

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM DINAMIKA GLOBAL

Marcus Priyo Gunarto*

Abstract

Human rights have been often interpreted as a universal value by the developed countries. However, on the other side, there are common acceptance that every nation has their own human rights value with have particularistic character. In process of globalization, the dilemma between universal and particularistic value of human rights often manipulate by interest groups as political commodity/ bargain power to reach their own goals.

This article tries to explain that the process of globalization with related to the protection of human rights did not have monolithic, homogeneous, or uniform characters otherwise it was full of political, economical, and social dynamics interest.

Kata kunci : hak asasi manusia, kepentingan politik, sosial dan ekonomi

A. Pendahuluan

Menurut Boaventura Santos, globalisasi bukanlah fenomena yang *monolithic*, *homogen*, atau *uniform*, tetapi merupakan fenomena *multifacet* yang bervariasi yang mengkombinasikan antara keragaman dengan kemajemukan lokal, antara kreasi *bottom up* dengan imposisi *top down*, ketiadabatasan global dengan keragaman lokal, serta identitas nasional dengan identitas etnis. Globalisasi juga menunjukkan diri sebagai fenomena yang memiliki banyak segi dengan dimensi-demensi ekonomi, sosial, politik, budaya, dan hukum yang saling

berjalin secara majemuk. Globalisasi berkaitan pula dengan perubahan lain yang terjadi pada sistem dunia seperti ketidak-sederajatan, ledakan penduduk, kerusakan dan lain sebagainya.¹

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai isu global, di Indonesia menunjukkan adanya dinamika politis berupa tarik menarik antara universalisme dengan partikularisme, uniformitas dengan differensi lokal, *imposisi top down* dengan kreasi *bottom up*. Tulisan berikut akan menyajikan proses dan faktor-faktor yang mendorong perlindungan HAM melalui produk

* Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM dan Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

¹ Santos, 1995, *Toward a New Common Sense, Law Science and Politics in the Paradigmatic Transition*, Roudledge, New York, hlm. 252-257.

perundang-undangan di Indonesia² dalam dinamika tuntutan global yang menunjukkan adanya tarik menarik kepentingan antara universalisme dengan partikularisme, uniformitas dengan differensi lokal, imposisi *top down* dengan kreasi *bottom up*.

Implikasi perkembangan teknologi dan informasi yang telah menjadikan dunia tanpa batas, transformasi budaya sebagai hal yang tak terelakkan dan mempengaruhi perilaku dan pemikiran setiap bangsa. Namun demikian, arus pemikiran tentang HAM di Indonesia tidak sepenuhnya dapat diterima oleh rezim yang sedang berkuasa pada era Orde baru. Hal ini dikarenakan konstruksi negara totaliter yang menerapkan strategi korporatisme negara menolak segala ide yang akan menjadi pengancam kedudukan orang-orang yang berkuasa di pemerintahan. Penolakan ide tersebut secara teoritik pernah ditunjang oleh arus pemikiran relativisme kultural yang menganggap HAM sebagai hasil pemikiran budaya barat yang belum tentu cocok dengan nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah mempunyai Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah Orde Baru menolak gagasan penegakan HAM dalam standar global dengan mengedepankan pada interpretasi negara sendiri tentang HAM. Dengan dalih partikularisme Indonesia, peme-

rintah pada waktu itu mendikotomikan antara nilai-nilai HAM dengan ideologi negara. Pada konteks ini, nampak telah terjadi tarik menarik antara universalisme dengan partikularisme dan sekaligus antara uniformitas dengan differensi lokal.

Tarik menarik imposisi *top down* dengan kreasi *bottom up* telah terjadi pula ketika gagasan pemerintah Orde Baru secara terus menerus memperoleh tekanan dari komunitas global dan *civil society domestic*. Kesulitan Pemerintah Indonesia dalam diplomasi global akhirnya memaksa Indonesia untuk bergabung dengan Komisi Hak Asasi Manusia PBB awal tahun 1990 dan mengakui perlunya Hak Asasi Manusia. Sementara itu, tekanan politik domestik telah mendorong dimulainya keterbukaan, walaupun dalam tahap yang masih terbatas. Hal ini menandai mulai terjadi pelunakan negara dalam menanggapi isu penegakan hak asasi manusia, termasuk dibentuknya Komnas HAM serta disusunnya undang undang tentang perlindungan hukum terhadap pelanggaran HAM yang berat.

B. Hak Asasi Manusia Dalam Transformasi Budaya Global

Memasuki abad 21 hampir tidak ada perubahan batas-batas teritorial politik ne-

² Beberapa peraturan perundang-undangan yang secara jelas menyebutkan HAM di antaranya tertuang di dalam:

- (1) TAP MPR No. XVII/ MPR 1998 tentang Hak Asasi Manusia.
 - (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
 - (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
 - (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
 - (6) Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Disamping, itu masih banyak peraturan perundang-undangan yang memuat perlindungan terhadap nilai-nilai HAM yang tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang Undang tentang Hukum Acara Pidana, Perlindungan Konsumen, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan lain sebagainya.

gara-negara di dunia. Batas-batas itu masih sama jelasnya dengan batas-batas teritorial sebelumnya,³ akan tetapi interaksi transnasional menunjukkan intensitas yang sangat dramatis. Interaksi transnasional itu tidak hanya terjadi pada perpindahan orang antar negara seperti wisatawan, atau pengungsi, tetapi telah sampai pada sistem produksi, transfer keuangan, sampai penyebaran informasi dan gambar-gambar ke seluruh dunia melalui teknologi komunikasi dan media massa. Proses ini dilihat oleh banyak ahli sebagai bentuk penyimpangan kualitatif dari bentuk-bentuk hubungan-hubungan antar negara sebelumnya yang kemudian dinyatakan sebagai fenomena baru tentang globalisasi. Gidden mendefinisikan globalisasi sebagai "pengintensifan hubungan-hubungan dunia secara sedemikian rupa, sehingga kejadian-kejadian lokal dapat terbentuk oleh kejadian-kejadian yang berada di tempat yang jauh atau sebaliknya".⁴ Melalui proses globalisasi, maka batas-batas antar negara menjadi tidak begitu penting. Penetrasi budaya masyarakat melalui teknologi informasi sebagai sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Pada era global orang dapat dengan cepat melakukan interaksi dengan pihak lain dalam tempo yang sangat singkat. Teknologi transportasi dan komunikasi telah menjadikan persinggungan budaya antar bangsa kian lebih intensif. Sejalan dengan penerapan teknologi ini, kompetisi untuk berebut pengaruh antar bangsa maupun antar negara juga telah menunjukkan intensitas kenaikan

yang luar biasa. Suasana ini dengan sendirinya berpengaruh terhadap tatanan politik, ekonomi, hukum, budaya, pertahanan dan keamanan negara-negara dunia.

Dari perspektif sejarah, hubungan antar bangsa yang telah menghasilkan transformasi budaya, sesungguhnya sudah terjadi sejak lama. Merujuk pendapat Alfred Weber⁵ bangkitnya poros sejarah sekitar abad ke-5 sebelum masehi (SM), ketika di Cina, India, Timur Tengah dan Yunani bangkit filsuf-filsuf dan pembentuk-pembentuk agama yang besar, adalah disebabkan oleh tersebarnya pemakaian kuda sebagai hewan pacuan dan penarik kereta. Dalam konteks transformasi budaya, yang ingin dikatakan Weber adalah bahwa revolusi dalam perhubungan lalu lintas dan komunikasi antar manusia menyebabkan revolusi masyarakat dan kebudayaan yang maha besar di zaman itu.

Globalisasi yang dipacu oleh perkembangan teknologi informasi dan transportasi, di satu sisi memberikan kemudahan dan kenikmatan bagi umat manusia, tetapi di sisi yang lain berpengaruh atas jiwa dan kehidupan manusia. Menurut Alisyahbana :

sesungguhnya umat manusia sekarang ini berada dalam krisis transformasi masyarakat dan kebudayaan. Krisis ini, bahkan, telah menjelma dalam kekacauan pikiran dan kepercayaan, konflik dan permusuhan yang tak habis-habisnya. Ini semua adalah gejala inersia atau kelambanan perasaan, pikiran, dan imajinasi manusia

³ Kenichi Ohmae, "The Borderless World", diterjemahkan oleh Budiyanto, *Dunia Tanpa Batas*, Binarupa Aksara, Jakarta, hlm. 20.

⁴ Gidden, dalam Santos, *Op.Cit.*, hlm. 252.

⁵ Sutan Takdir Alisyahbana, 1998, *Kebudayaan Sebagai Perjuangan*, Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 48.

dalam menyesuaikan dirinya kepada mengecilnya jarak-jarak didunia dan ruang angkasa yang tiada terbatas.⁶

Sekalian *inersia* dan lambatnya bangkit dari tanggungjawab dan solidaritas semesta ini nampak jelas dalam lapangan politik yang telah membagi-bagi dunia dalam negara-negara kebangsaan yang terbiasa memikirkan keamanan dan kesejahteraan serta kemakmuran diri sendiri yang kemudian memunculkan perlombaan kekuasaan, martabat dan perlombaan senjata antar negara maupun antar bangsa.⁷ Di lapangan ekonomi, persaingan, pertentangan, dan kekacauan merajalela dalam perhubungan negara-negara. Berbagai negara telah berlomba memajukan hasil masing-masing dengan perkembangan industri, pertanian, pertambangan dan usaha-usaha ekonomi, dan perebutan pasar dunia. Untuk melindungi usaha-usaha ekonomi, mereka mengeluarkan aturan-aturan proteksionisme yang dianggap tidak adil bagi negara yang berkelebihan produksi/pengekspor, sebaliknya bagi negara penghasil yang belum mampu bersaing dengan negara lain, pasaran bebas dianggap sebagai ancaman. Di bidang agama, yaitu dalam hubungannya dengan kekudusan yang gaib, yang memberi makna kepada hidupnya yang fana di tengah-tengah kebakaan yang tiada bermula dan berakhir, persaingan, curiga mencurigai, dan permusuhan tak kurang hebatnya. Hal ini disebabkan masing-masing agama mengikatkan dirinya pada keyakinan

bahwa kepercayaannya adalah satu-satunya yang benar dan berlomba saling untuk mengatasi berbagai peristiwa di dunia sesuai dengan sumber keyakinannya. Selama kesempitan jiwa ini berlaku, ketegangan antara penganut agama-agama akan terus berjalan.

Sebaliknya transformasi budaya, secara teoritik dapat menjadi pembuka mata dan telinga dari kesempitan berpikir dalam menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat manusia. Kesadaran akan sumber daya alam maupun manusia yang terbatas tidak mungkin akan memenuhi kebutuhan manusia yang tiada terbatas telah mengantarkan manusia untuk mencari sumber-sumber alternatif untuk memenuhi kebutuhan manusia di negara lain. Kondisi yang saling membutuhkan tersebut pada akhirnya mendorong antar negara untuk saling bekerja sama untuk mencukupi kebutuhan masing-masing. Hubungan-hubungan antar bangsa atau negara ini dengan sendirinya juga akan saling mempertemukan budaya antar bangsa. Melalui transformasi budaya dapat memperkaya budaya suatu bangsa dalam mengisi kekosongan nilai-nilai yang dianggap belum tercakup di dalam nilai-nilai lokal.

Sekalipun secara teoritik hal tersebut benar, tetapi pertanyaan yang paling mendasar dari para ilmuwan sosial berkenaan dengan persoalan budaya belum terjawab secara memuaskan. Apakah suatu budaya dunia yang dilahirkan melalui globalisasi telah benar-benar ada selama dekade yang terakhir ini? Meskipun tidak mengatakan

⁶ *Ibid.*, hlm. 49-50.

⁷ David C. Korten, 1997, "When Corporation Rule The World", alih bahasa Ir. Agus Maulana, *Bila Korporasi Menguasai Dunia*, Proffesional Books, Jakarta, hlm. 41; mengatakan dunia ini makin terbagi antara mereka yang hidup dalam kemiskinan, perbudakan dan ketidakpastian ekonomi yang tidak manusiawi.

benar-benar telah lahir satu bentuk budaya baru yang tunggal yang diakui oleh seluruh bangsa, tetapi Santos⁸ mengakui bahwa paling tidak sejak abad 16, hegemoni ideologi oleh agama, politik, ekonomi dan ilmu di Eropa, melalui imperialisme budaya, telah menghasilkan *isomorphisme* di antara budaya-budaya yang ada di dalam sistem dunia.

*Dengan merujuk Stephen Toulmin, gagasan tentang budaya dunia dapat dijejaki sejak jaman Hegel dari abad 17 sampai dengan sekarang. Pengintensi-pen secara dramatis aliran-aliran lintas batas akan barang-barang komoditi, modal, tenaga kerja, orang, gagasan-gagasan dan informasi di-yakini telah memunculkan berbagai kemenyatuan isomorphisme dan berbagai hibridasi di antara berbagai budaya nasional dalam bentuk gaya arsitektur, mode pakaian, kebiasaan makan atau penkonsumsian budaya secara massal. Walaupun demikian, meskipun sebagian penulis mengakui ada relevansi yang dimiliki antara pengaruh intensitas hubungan-hubungan lintas batas dengan budaya lokal, tetapi tidaklah menghasilkan budaya dunia.*⁹

Kalaupun *isomorphisme* dan berbagai hibridasi di antara berbagai budaya nasional tersebut dianggap sebagai bentuk globalisasi budaya, maka hal itu hanyalah budaya global sepotong-sepotong saja. Maksudnya adalah budaya itu hanya terkait dengan aspek-aspek

kehidupan sosial yang dicakup atau dalam kaitan dengan kawasan-kawasan dunia yang dicakupnya saja. Dengan demikian, budaya global dapat ada dalam sifat, rentang kisar dan wawasan politik yang sangat berbeda dengan pemahaman kemenyatuan budaya. Salah satu yang diintrodusir melalui transformasi budaya ini adalah Hak Asasi Manusia.¹⁰

C. Dinamika Perlindungan Hak Asasi Manusia ke Dalam Hukum Nasional

Hak Asasi Manusia merupakan salah satu gagasan untuk mengeleminasi segala potensi yang dapat menjadi pemicu pertentangan/perpecahan antar bangsa ialah hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap orang dimanapun ia berada. Hak ini harus memperoleh perlindungan dari semua bangsa-bangsa yang beradab di dunia.

Perwakilan berbagai bangsa telah lama saling bertemu untuk berunding untuk mengelaborasi sekalian hak-hak itu yang kemudian ditawarkan kepada negara-negara peserta agar diberlakukan sebagai hukum nasional. Meskipun usaha ini adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai manusia tidaklah mudah untuk merealisasikan ide ini. Hampir selalu terdapat perkembangan dan dinamika tersendiri setiap usaha memasukkan perlindungan HAM ke dalam hukum nasional. Di antaranya, gagasan HAM dipandang secara pesimis dan dicurigai sebagai sarana penindasan oleh negara-negara adikuasa kepada negara-negara yang masih

⁸ Santos, *Loc. Cit.*

⁹ Dalam hal ini budaya diartikan sebagai sebuah proses sosial yang terbangun di dalam interaksi antara hal-hal yang bersifat universal dengan hal-hal yang bersifat khusus, bahkan dikatakan merupakan suatu usaha perjuangan melawan keseragaman.

terbelakang. Pollis dan Schwab, dua orang penganut relativisme kultural berpendapat karena secara historis HAM muncul di Eropa Barat dan Amerika Utara, HAM pada dasarnya terkait dengan, dan memang terbatas pada konsep-konsep kultural dan filosofis dari tradisi *oksidental*.¹¹ Pendapat senada juga dikemukakan oleh Picht yang mengambil ide filsafat Stoik, ide-ide yang di Eropa pun telah kehilangan landasannya, nyaris tidak pernah disepakati pada skala global. Dengan asumsi ini Picht sampai pada kesimpulan yang skeptis bahwa "tata global HAM tidak lain kecuali khayalan hampa".¹² Samuel P. Huntington, seorang tokoh yang lebih dikenal dengan si penyeru benturan peradaban, juga menyatakan bahwa "Dalam politik globalnya, HAM sebagaimana demokrasi, liberalisme, dan sekularisme politis, dimiliki oleh peradaban barat semata-mata".¹³ Dalam konteks keberlakuan universalisme HAM, Huntington yakin hal ini akan gagal. Bagi orang-orang dari peradaban lain, katanya, satu-satunya jalan untuk benar-benar mencapai HAM adalah menerima esensi nilai-nilai barat dan karenanya secara diam-diam beralih ke peradaban barat.

Pandangan-pandangan tersebut di atas didasarkan pada relativisme kultural yang cenderung pesimis apabila HAM diterapkan

pada bangsa-bangsa yang telah mempunyai budayanya sendiri. Bagi bangsa yang telah merasa mapan dalam penghayatan nilai-nilai kulturalnya cenderung akan mengedepankan tata nilai yang telah melembaga dan dihayati untuk menyelesaikan konflik selama bertahun-tahun. Resistensi itu juga muncul sehubungan pengalaman mereka yang secara historis penduduknya mengalami penderitaan akibat dari kolonialisme Eropa dan masih merasa terancam oleh imperialisme barat. Mereka menolak ukuran-ukuran HAM yang disamaratakan, karena adanya kecurigaan bahwa sesungguhnya orang-orang Barat yang memperjuangkan HAM itu tengah memaksakan norma dan nilai-nilai kultural mereka secara imperialistik.

Berbeda dengan pandangan-pandangan sebelumnya, Heiner Bielfeldt menempatkan isu HAM bagi bangsa-bangsa sebagai pusat isu yang tumpang tindih (*overlapping consensus*) lintas budaya mengenai standar-standar normatif dasar kita yang kian multi-kultural.¹⁴ Dalam konsep ini, konsensus tumpang-tindih bukan hanya konsep diskriptif melainkan juga merupakan tantangan kritis, yang dipertaruhkan bukanlah konsensus faktual, melainkan konsensus normatif dalam arti bahwa orang-orang yang menganut keyakinan yang berlainan bagaimana-

¹⁰ Reservasi beberapa konvensi Internasional dalam hukum nasional dapat dianggap sebagai rentang kisar yang berbeda dalam pemahaman kemenyatuan budaya.

¹¹ Pollis dan Schwab, 1979, "Human Right, A Western Construct with Limited Aplicability", dalam *Human Right: Cultural and Ideological Perspective*, Praeger, New York, hlm. 18.

¹² Georg Picht 1980, "Zum geistesgeschicht-lichen Hintergrund der Lehre von den Menschenrechten", dalam *Hier und Jetzt: Phillosophieren Nacht Auschwitz und Hiroshima*, Jerman Klett-Cotta, Stuttgart, hlm. 116-135; sebagaimana dikutip Heiner Bielefeldt, dalam *Majalah Wacana, Insist*, hlm. 12.

¹³ Samuel P. Huntington, 1996, *The Clash of Civilization and the Remarking of World Order*, Simon & Schuster, New York, hlm. 70.

¹⁴ Heiner Biefieldt, "Hak Azasi Manusia: Benturan Antara Barat dan Islam", dalam *Insist*, hlm. 48.

pun harus diperbolehkan untuk menyetujui beberapa prinsip dasar keadilan, sehingga terbentuk kebersamaan dan kerjasama atas dasar kesetaraan dan kemerdekaan. Kondisi ini merupakan idaman masyarakat modern yang pluralistik, bukan pemberian *status quo*. Di satu sisi konsep ini akan membuka ruang konseptual bagi pluralitas visi jagad, idiologi, agama, doktrin, filsafat, dan sebagainya yang berlainan. Di sisi yang lain juga akan menentukan batas-batas toleransi politik dalam masyarakat liberal. Dengan demikian, maka HAM Universal mempunyai kekuatan normatif kritis dengan rancangan untuk mengarah ke tata hukum dan tata politik yang berdasarkan pada keikutsertaan dan kemerdekaan yang setara. Akan tetapi, agar tidak terlalu menekankan klaim normatif HAM, perlu diperhatikan bahwa cakupan normatif HAM itu bersifat terbatas. Menurut RAWL, ide keadilan politis bukanlah doktrin yang serba ada, melainkan justru berfokus pada struktur dasar masyarakat. Hal ini berlaku juga untuk HAM, sebagai standar/ukuran politik dan hukum, HAM tidak berpretensi untuk mengarahkan kehidupan seseorang, baik selaku individu maupun sebagai anggota masyarakat. HAM tidak akan menghadirkan jawaban apapun tentang makna kehidupan dan kematian. HAM juga tidak akan menyediakan ritual dan simbol yang bisa dipakai untuk mengungkapkan penghormatan dan penghargaan bersama melampaui bidang hukum dan politik. Singkatnya, HAM bukanlah doktrin yang serba ada, dan juga bukan kode etik pelaksanaan yang komprehensif. HAM tidak

bersaing dengan tradisi kebudayaan dan keagamaan, walaupun HAM berpengaruh kritis terhadap interpretasi dan perkembangan tradisi-tradisi ini.

Perkembangan perlindungan HAM di Indonesia diawali dengan tekanan-tekanan politik baik yang berasal dari domestik maupun luar negeri. Pada tulisan ini akan digambarkan bagaimana korporatisme negara yang kemudian melahirkan otoritarianisme pemerintahan mendapatkan reaksi dari elemen masyarakat pro demokrasi yang bersinergi dengan kekuatan luar negeri untuk menekan pemerintah dalam mewujudkan perlindungan HAM bagi rakyat Indonesia. Uraian dengan penekanan historis ini juga dimaksudkan untuk membuktikan bahwa perlindungan HAM di Indonesia tidak bersifat monolitik, atau uniform, tetapi sebagai proses yang kompleks dan multifaset.

Menurut Pratikno dan Cornelis Lay¹⁵ pada saat pemerintahan dikuasai oleh rezim Orde Baru, negara memonopoli pembentukan institusi-institusi kemasyarakatan dan telah melahirkan berbagai macam kelompok kepentingan seperti SPSI, PWI, KADIN dan lain sebagainya yang sepenuhnya dikontrol oleh negara. Korporatisme negara yang mengkonstruksi negara otoriter ini, pada akhirnya mendapatkan reaksi dari berbagai elemen masyarakat pro-demokrasi seperti mahasiswa, LSM, partai politik yang anti *status quo*, dan lain sebagainya. Secara kebetulan sikap penguasa Orde Baru yang menolak perlindungan HAM itu juga disokong oleh para penganut relativisme

¹⁵ Pratikno dan Cornelis Lay, *Komnas HAM 1993-1997, Pergulatan Dalam Otoritarianisme*, Fisipol UGM, Yogyakarta.

kultural yang pada dasarnya mengang-

gap HAM adalah produk budaya barat yang tidak sepenuhnya dapat diberlakukan di negara-negara yang telah berpegang pada nilai-nilai kultural yang telah mapan.

Tekanan-tekanan politik domestik dan luar negeri dalam pengaturan HAM tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial politik Indonesia pada masa lalu. Realitas sosial politik yang kemudian melahirkan tekanan-tekanan politik domestik itu dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Politisasi Idiologi dan Otonomi Negara

Sejak tumbanganya Orde Lama dan digantikan oleh Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, pembangunan ekonomi dan stabilitas politik telah menjadi elemen kunci idiologi pemerintah. Warisan krisis ekonomi era Orde Lama telah dimanfaatkan oleh Soeharto dengan tepat untuk memperoleh legitimasi dari rakyat dengan menampilkan isu stabilitas politik demi mengemban tugas-tugas ekonomi. Idiologi Pancasila kemudian diinterpretasikan kembali secara sempit sehingga merepresentasikan dirinya sebagai instrumen efektif pembatasan wacana politik dan perilaku sepanjang pemerintahan Orde Baru.

Pemerintah atas nama negara memiliki kewenangan untuk menekan kekuatan-kekuatan sosial yang dianggap membahayakan pembangunan dan anti Pancasila. Implikasi pandangan seperti ini terhadap praktek politik kemudian menjadikan eksekutif sangat kuat tanpa mekanisme kontrol, sementara partisipasi masyarakat dibatasi dan dikontrol secara sangat ketat.

2. Politik Represif Orde Baru dan

Pelanggaran HAM

Sejalan dengan politisasi idiologi dan penekanan pada otonomi negara, pemerintahan Orde Baru menggunakan instrumen kekerasan untuk mencapai stabilitas politik yang diinginkan. Aktivitas politik yang berkuasa pada orde sebelumnya dihancurkan dan oposisi dibatasi. Sejumlah badan intelijen untuk mengontrol perilaku masyarakat mulai dibentuk, di antaranya adalah:

- a. BAIS (Badan Intelijen Strategis), didirikan pada tahun 1983 yang ditugasi untuk menganalisa situasi politik nasional dan berhubungan erat dengan badan ABRI yang mengurus kontrol sosial politik. Badan ini terdiri unsur-unsur tentara.
- b. BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen), yang banyak diisi oleh orang sipil, institusi pendidikan, Lembaga Sandi Negara, atau Jaksa Agung Muda bidang intelijen.
- c. Ditjensospol (Direktorat Jenderal Sosial dan Politik), berada di bawah koordinasi Depdagri untuk membantu kelancaraan Departemen ini, serta membantu pemerintah lokal memelihara stabilitas daerah masing-masing. Di bawahnya Ditjensospol terdapat badan sejenis untuk tingkat Provinsi, Kabupaten/Kotamadya. Dalam prakteknya badan ini bertugas untuk menyaring calon anggota DPRD, calon Pegawai Negeri Sipil, dan mengeluarkan ijin bagi kegiatan penelitian.
- d. Kopkamtib, yang kemudian berganti nama dengan Bakorstanas adalah alat keamanan terpenting pada masa Orde Baru. Berdasarkan Keppres Tahun

1969, badan ini tidak hanya bertugas membersihkan sisa-sisa PKI, tetapi juga menangani persoalan-persoalan yang mengancam keamanan nasional, termasuk mengawasi pers dan aktivitas warga masyarakat yang kritis terhadap pemerintah. Kopkamtib adalah organisasi dengan kekuasaan tanpa batas di tingkat nasional sampai lokal. Menurut Tanter¹⁶ Kopkamtib membuka peluang bagi militer untuk turut mengendalikan negara secara *de facto* lewat hukum darurat sesuka hati. Kopkamtib pada waktu itu telah menjadi badan yang paling represif dan menakutkan yang selalu turut menyelesaikan persoalan politik di setiap organisasi kemasyarakatan, bahkan melakukan penangkapan kapan saja. Badan ini kemudian dibubarkan pada tanggal 5 September 1988 dan diganti dengan Bakorstanas dan Bakorstanasda. Badan ini beranggotakan pula warga sipil dan memiliki tugas yang sama dengan pendahulunya, tetapi meminimalkan penggunaan alat represi.

Begitu besarnya kontrol negara terhadap aktivitas warga negara melalui badan-badan intelijen yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru menunjukkan dominannya negara dalam perpolitikan yang pada akhirnya tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengendalikan perilaku negara. Atas nama negara dan program-program pemerintah, militer dan birokrat sipil dapat melakukan apa saja secara sah dalam perspektif negara.

Oleh karena itu, potensi pelanggaran HAM oleh negara menjadi sangat terbuka.

3. Konstruksi Politik Negara yang Otoriter

Politik negara yang cenderung otoriter akan selalu menghindar dari setiap wacana yang menyangkut HAM. Hal ini dikarenakan isu HAM akan cenderung menekan posisi orang-orang yang memegang kekuasaan negara. Karenanya sangat mudah dimengerti mengapa Indonesia di masa-masa pemerintahan Orde Baru selalu menghindarkan diri dari perdebatan tentang HAM yang akan mengancam kekuasaannya. Kalaupun muncul tanggapan dari negara tentang isu HAM, argumennya terlihat sangat tertutup, *defensive* dan partikularistik.

4. HAM Sebagai Isu Budaya Barat

Argumen lain yang digunakan oleh penguasa pada waktu itu adalah memberikan aksentuasi bahwa isu HAM merupakan isu yang lahir dan dikembangkan dari luar (Barat), bukan dari Indonesia sendiri. Negara beranggapan kontekstualisme harus dikedepankan dalam persoalan ini. HAM tidak dapat diterapkan secara universal tanpa mempertimbangkan konteks yang berkembang di suatu negara. HAM yang dianggap membawa nilai-nilai barat dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa yang telah memiliki UUD 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu, hingga tahun 1990 Indonesia tidak menjadi anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang sudah dibentuk sejak Tahun 1947.

¹⁶ Richard Tanter, 1990, *The Totalitarian Ambition: Intelligence Organisation in The Indonesian State*, in Arief Budiman (ed.), 1990, "State and Civil Society in Indonesia", *Monash paper on Southeast Asia*, No. 22, Monash University, Melbourne, hlm. 220.

Menurut Hasan Wirayuda, hal ini disebabkan oleh adanya persepsi yang salah mengenai HAM dalam konsep maupun dalam praktek. Penguasa mengira bahwa Indonesia telah sempurna dengan memiliki Pancasila dan UUD 1945. Ide tentang HAM dianggap tidak pada tempatnya. HAM dianggap sebagai persoalan luar yang dihadapkan dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai nilai domestik Indonesia.¹⁷ Berdasarkan pandangan Hasan Wirayuda, maka pemerintah Indonesia menempatkan HAM dalam perspektif yang partikularistik. HAM dalam optik penguasa Orde Baru sampai dengan tahun 1990 dianggap tidak sesuai dengan bangsa Indonesia yang telah mempunyai Pancasila dan UUD 1945. Gagasan ini secara teoritik, mendapatkan justifikasi dari penganut relativisme kultural sebagaimana telah disebut di muka. Mereka memandang bahwa HAM muncul di Eropa barat dan Amerika utara, sehingga HAM pada dasarnya terkait dengan konsep-konsep kultural dan filosofi dari tradisi *oksidental*. Akibatnya, masyarakat lain tidak akan bisa menjalankan sifat universalisme HAM.

Berdasarkan pandangan itu, maka tak mengherankan, negara menolak ide-ide HAM ala barat. Kecenderungan individualisme dalam gagasan HAM selalu dihadapkan dengan kolektivisme yang menjadi roh semangat berbangsa dan bernegara. Gagasan kolektivisme ini terwujud dalam ide negara integralistik yang mengandaikan adanya semangat kebersamaan dan kekeluargaan Di antara elemen-elemen yang ada. Dalam hal ini Pancasila dilihat sebagai basis idiologi

terbaik untuk menjelaskan semangat tersebut. Penjabaran Pancasila dianggap dapat menerangkan hubungan yang tak terpisahkan antara rakyat dengan rakyat, rakyat dengan Negara, antara penguasa dengan yang dikuasai, antara Tuhan dengan dengan manusia, antara dunia dengan semesta. Isu HAM kemudian menjadi tak relevan ketika segala sesuatu yang dilakukan oleh Negara dianggap untuk kepentingan bersama atau kolektif. Untuk dan atas nama kepentingan kolektif, rakyat tidak dapat mempertanyakan apapun, seandainya hal itu dianggap akan mengganggu stabilitas.

Realitas sosial politik tersebut di atas tidak melemahkan elemen pro demokrasi yang terus melakukan tekanan-tekanan terhadap rezim yang berkuasa. Apabila di kemudian hari perlindungan terhadap pelanggaran HAM yang berat mendapatkan perhatian dan pemerintah, maka hal itu tidak serta merta muncul karena kesadaran akan arti pentingnya perlindungan HAM, akan tetapi melalui proses sejarah panjang yang berliku. Terdapat banyak elemen masyarakat yang ikut memperjuangkan perlindungan pelanggaran HAM, di antaranya adalah mahasiswa dan LSM. Tata politik dan kebijakan negara yang tidak responsif terhadap kepentingan masyarakat telah memunculkan problem demokrasi yang akut. Akibatnya terjadi peminggiran Hak Asasi Manusia oleh negara terhadap masyarakat. Upaya yang dilakukan Orde Baru mencapai puncaknya di akhir tahun 1970 dan awal 1980.

Pada masa ini, Orde Baru bukan saja berhasil membatasi partai politik, namun

¹⁷ Wawancara Cornelis Lay dengan Hasan Wirayuda, 18 Juni 2002 di Praha, dalam Pratikno dan Cornelis Lay, *Op. Cit.*, hlm. 40.

juga peranan politik kampus. Terhadap partai politik, pemerintah berhasil melemahkan partai politik pada tingkat massa melalui politik massa mengambang dan penerapan asas tunggal, sedangkan terhadap kehidupan politik kampus, pemerintah berhasil menerapkan konsep NKK/BKK. Melalui konsep NKK/BKK lembaga kemahasiswaan intra kampus tidak dapat menunjukkan kemampuan gerakannya seperti Dewan Mahasiswa di masa peralihan 1966-1967, Malari 1974, serta benturan keras antara negara dengan mahasiswa 1978. Penyempitan ruang gerak mahasiswa melalui SKS yang begitu rupa memaksa mereka untuk memusatkan perhatian semata-mata pada persoalan studi telah menjadikan kehidupan kampus terisolir dari aktivitas politik. Akibat dari keberhasilan melalui penataan ini, kemudian aktivitas politik mahasiswa mulai bergeser dari wadah formal ke lembaga kemahasiswaan yang bersifat *ad hoc* dan berstatus ekstra konstitusional. Tuntutan, desakan, maupun unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa lebih banyak dilakukan untuk dan atas nama lembaga ekstra konstitusional. Sebutlah misalnya lembaga *ad hoc* yang ada di Universitas Gadjah Mada, Tegak Lima (Komite Penegak Hak Politik Mahasiswa), Gempur Deru

(Generasi Mahasiswa Puma Orde Baru), PPPBI (Panitia Pemilihan Presiden Baru Indonesia), dan lain sebagainya. Elemen LSM tak kalah galaknya dalam menuntut perubahan dan terwujudnya perlindungan HAM. Organisasi yang semula disebut dengan ORNOP¹⁸ ini telah banyak melakukan advokasi untuk masyarakat.

Sementara itu, praktek politik Orba yang banyak melanggar HAM ternyata mengundang reaksi yang cukup besar di tingkat internasional. Kasus-kasus pembantaian aktivis PKI atau yang dituduh aktivis PKI pasca Gerakan 30 September, Tanjung Priok, Lampung, Timor Timur maupun Aceh menempatkan Indonesia dinilai sebagai salah satu negara pelanggar HAM yang paling serius di dunia.¹⁹ Tekanan internasional terhadap Orba juga muncul ketika Indonesia dianggap tidak memperhatikan para tawanan politik. Pramudya Anantatour²⁰ menceritakan bagaimana untuk pertama kalinya delegasi Internasional datang ke Pulau Buru untuk melihat keadaan dan perlakuan negara terhadap para tahanan. Peristiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya, ini dianggap sebagai tekanan dunia internasional terhadap pelanggaran HAM di Indonesia

¹⁸ Semula nama yang digunakan adalah Lembaga Non Pemerintah atau Organisasi Non Pemerintah sebagai terjemahan dari *Non Governmental Organization* (NGO). Pilihan istilah LSM sebetulnya merupakan penghalusan kata. Kalangan LSM memandang perlu dilakukan revisi dengan pertimbangan, *pertama*, pilihan ORNOP bisa berkesan oposan bahkan anti kepada pemerintah. *Kedua*, upaya mengembangkan kemandirian dan keswadayaan bukanlah sesuatu yang harus dilakukan oleh organisasi non pemerintah saja, tetapi dapat bekerjasama dengan pihak pemerintah.

¹⁹ Hasil wawancara Cornelis Lay dengan Menteri Luar Negeri Hasan Wirayudha di Ceko 18 Juni 2002, diceritakan bahwa tekanan masyarakat internasional terhadap Indonesia terlihat ketika Indonesia hadir dalam sidang Komisi HAM sebagai Observer. Sidang yang berlangsung selama 6 (enam) minggu dan dimulai pada tanggal 27 Januari 1989 itu menempatkan Indonesia pada posisi yang sulit. Indonesia pada saat itu diserang habis-habisan akibat pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah.

²⁰ Pratikno dan Cornelis Lay, 2002, *Op.Cit.*, hlm. 50.

Tekanan politik internasional terhadap isu pelanggaran HAM juga terjadi di bidang ekonomi. Hal ini nampak pada pembubaran GSP (*General System Preference*) dan IGGI (*International Governmental Group on Indonesia*). GSP adalah bentuk kerjasama ekonomi antara negara maju dengan negara berkembang. Di sini negara berkembang memperoleh pengurangan atau pembebasan bea masuk bagi produk-produk tertentu yang diekspor ke negara maju. Pengurangan atau pembebasan bea masuk ini tidak didasarkan pada asas resiprositas, artinya negara maju tidak mensyaratkan konsesi atau imbalan tertentu kepada negara maju yang memberikan kelonggaran, tetapi syarat itu tidak permanen dan dapat dicabut setiap waktu. Syarat inilah yang kemudian oleh negara-negara maju dipakai sebagai alasan untuk menghentikan kerjasama dengan alasan negara berkembang melakukan pelanggaran HAM.²¹ Berbeda dengan GSP, kasus IGGI meskipun sama-sama menyangkut isu HAM tetapi mempunyai kasus posisi yang berbeda. Dalih pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di Santa Cruz Dili Timor Timur pada November 1991 menjadi alasan bagi negara-negara yang tergabung dalam IGGI seperti Belanda, Kanada, dan Denmark menunda sebagian atau seluruh bantuan pembangunan sampai ada hasil investigasi dan prosekusi.

Peristiwa ini kemudian mendorong Pemerintah Indonesia mengirimkan surat kepada Pemerintah Belanda dan meminta agar menghentikan semua bentuk bantuan pembangunan baik dalam bentuk hibah atau hutang. Indonesia juga meminta agar Belanda tidak menyiapkan bantuan pembangunan yang baru dan tidak menyelenggarakan pertemuan IGGI lagi. Tindakan IGGI itu dianggap telah mencampuri urusan Pemerintah Indonesia. Namun ada beberapa kalangan yang berpendapat penghentian ini adalah upaya LSM Indonesia yang mendesak IGGI, karena adanya pelanggaran HAM dalam pembangunan Waduk Kedungombo yang didanai oleh Bank Dunia. Hal ini nampak dalam pernyataan Gus Dur yang datang bersama-sama dengan aktivis LSM pada sidang International Non-Government di Nieuwpoort, Belgia pada April 1989. Gus Dur meminta agar bantuan IGGI diberikan berdasarkan sikap Pemerintah Indonesia terhadap pelaksanaan HAM. Perkembangan ke depan menghasilkan apa yang disebut dengan *Aide Memoire* yang dirumuskan oleh 52 partisipan, 22 di antaranya berasal dari Indonesia. *Aide Memoire* secara keras mengkritik pemerintah Indonesia pelanggaran HAM dalam pembangunan Waduk Kedungombo yang didanai Bank Dunia. Oleh Pemerintah Indonesia *Aide Memoire* ini dianggap sebagai upaya merusak citra

²¹ Indonesia memanfaatkan GSP pada tahun 1980, tetapi pada tahun 1994 *International Labor Right Education and Research Found* (ELRERF) mengajukan petisi kepada Pemerintah Amerika Serikat mencabut fasilitas GSP bagi Indonesia karena 3 (tiga) alasan. *Pertama*, telah terjadi pelanggaran buruh; *kedua*, jika ingin memperpanjang fasilitas GSP harus memenuhi syarat yang berkaitan dengan HAM, khususnya hak-hak buruh; dan *ketiga*, pemerintah Indonesia harus memberikan jaminan pembentukan serikat buruh disetiap unit kerja, dihindarinya militer dalam persoalan perburuhan, kemudahan pembuatan perjanjian kerja kolektif, serta syarat tambahan agar dibuat keterbukaan terhadap organisasi buruh asing. Semua prasyarat ini dipakai sungguh-sungguh oleh Amerika Serikat untuk menekan Indonesia, tetapi ada yang memaknai karena produk-produk Amerika mulai tersaingi oleh produk Indonesia, khususnya tentang produksi tekstil.

Indonesia di luar negeri dan semua partisipan konferensi diinterogasi oleh aparat keamanan. Namun yang perlu dicatat dalam kaitan upaya perlindungan HAM adalah desakan dari dalam negeri sendiri terhadap isu HAM sudah cukup menggema ke berbagai penjuru, salah satunya adalah memanfaatkan instrumen internasional.

D. Kebijakan Perundang-undangan Perlindungan Hak Asasi Manusia Indonesia

Secara normatif perlindungan HAM telah dimulai sejak Negara Indonesia ini ada,²² tetapi perhatian terhadap pelanggaran HAM secara substansial baru sekitar tahun 1981, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang kemudian disusul dengan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak

Asasi Manusia yang Berat.

Walaupun kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sering dianggap sebagai titik tolak perlindungan HAM, tetapi sesungguhnya perlindungan itu baru sebatas pada tersangka pelaku perbuatan pidana. Terhadap orang yang menjadi korban kejahatan justru tidak/kurang mendapat perhatian secara memadai, karena KUHP lebih *offender oriented* daripada *victim oriented*.

Perlindungan pelanggaran HAM dengan standar norma-norma Internasional dalam perundang-undangan di Indonesia baru diberikan perhatian sejak adanya Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian dimasukkan pula dalam amandemen UUD 1945. Namun demikian, kemajuan yang lebih progresif sebenarnya terjadi sejak adanya perhatian terhadap peradilan terhadap para pelaku pelanggaran HAM berat.

Sekelumit aspek historis, ide untuk mengadili para pelaku kejahatan dan pelanggaran HAM yang berat tersebut, sebenarnya mempunyai perkembangan sejarah sendiri. Pemikiran ini telah muncul sejak zaman Yunani kuno, ketika terjadi penuntutan terhadap pelaku kejahatan dan konflik bersenjata secara brutal atas dasar standar nilai dan norma kemanusiaan yang bersumber pada filsafat dan agama.²³ Dalam perkembangan selanjutnya telah lahir pula Konvensi Den Haag (*The Hague Convention*) pada tahun 1899 dan 1907 yang mengatur tentang Hukum Perang. Konvensi ini menegaskan

²² Pandangan ini didasarkan pada pemikiran bahwa Pembukaan UUD 1945 beserta batang tubuhnya pada dasarnya memuat nilai-nilai HAM. Pandangan serupa juga menganggap KUHP sebagai sarana perlindungan HAM.

²³ Muladi, "Berbagai Dimensi Peradilan Hak Asasi Manusia", Makalah pada Penataran Nasional Hukum dan Kriminologi Kerjasama ASPEHUPIKI dan FH UBAYA, tanggal 14 Januari 2002.

pentingnya perlindungan terhadap penduduk sipil, kehidupan manusia, hak milik pribadi, hak dan kehormatan keluarga serta keyakinan agama. Perlindungan atas dasar asas-asas hukum internasional yang berlaku sebagai kebiasaan di masyarakat beradab, hukum kemanusiaan, dan hati nurani harus diberikan kepada penduduk maupun kepada pihak yang berperang. Namun demikian, *The Haque Convention* masih berorientasi pada kewajiban dan tugas-tugas negara, belum mengatur pertanggungjawaban pidana secara individual.

Pemikiran untuk menuntut dan mengadili para pelaku kejahatan dan pelanggaran HAM yang berat baru memperoleh perhatian sejak pasca perang dunia I dan II, yang ditandai dengan lahirnya *The International Military Tribunal* yang berkedudukan di Nuremberg pada tahun 1946 dan *The International Military for the Far East* yang berkedudukan di Tokyo pada tahun 1948. *The International Military Tribunal* yang berkedudukan di Nuremberg dimaksudkan untuk mengadili para penjahat perang Nazi selama perang dunia II, sedangkan *The International Military for the Far East* dimaksudkan untuk mengadili para penjahat perang Jepang selama perang dunia II.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut di atas, muncul pemikiran tentang kemungkinan dibentuknya Pengadilan Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) yang mempunyai kewenangan mengadili pelanggaran HAM yang berat (*the most serious violation of Human Right*) yang bersifat permanen. Berkaitan dengan hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa menugasi *The International Law Commission* (ILC) untuk melakukan kodifikasi, pengembangan dan pengkajian hukum Internasional. Rencana

pembentukan ICC dapat diselesaikan pada tahun 1951 yang kemudian direvisi pada tahun 1953, tetapi baru disampaikan kepada Majelis Umum PBB tahun 1994. Pada tanggal 17 Juli 1998 berhasil dituntaskan dan diadopsi konvensi tentang pembentukan ICC tersebut yang kemudian terkenal dengan nama *The Rome Statute of The International Criminal Court, United Nation Doc. A/Conf. 183/9117 July 1998*.

Pada saat proses penyelesaian rancangan Statuta Roma 1998 pernah muncul perkembangan yang sangat memprihatinkan sehubungan dengan peristiwa mengerikan yang terjadi selama perang di negara-negara bekas Yugoslavia (*former Yugoslavia*) pada tahun 1991-1992 dan selama perang saudara (*civil war*) di Rwanda selama tahun 1994 yang diidentifikasi telah terjadi kejahatan dan pelanggaran HAM yang berat. Peristiwa tersebut telah mendorong Dewan Keamanan PBB untuk membentuk Mahkamah Internasional yang bersifat *ad hoc* untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat di kedua wilayah tersebut. Mahkamah Internasional tersebut adalah *The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) yang berkedudukan di Den Haag dan *The International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) yang berkedudukan di Arusha.

Langkah dan kebijakan untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat dilakukan pemerintah Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mulai berlaku sejak tanggal 23 November 2000. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang berat dengan melakukan pembentukan pengadilan Hak

Asasi Manusia, yaitu untuk menciptakan perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM, serta memberikan perlindungan, kepastian, keadilan dan perasaan aman kepada perorangan dan masyarakat.²⁴

Namun demikian, kehadiran peradilan HAM yang berat ini apabila dikaitkan dengan peristiwa politik yang melatarbelakangnya tidak serta merta atas dasar kehendak untuk memberikan perlindungan masyarakat agar mempunyai kedudukan yang terhormat dimata tata pergaulan internasional, akan tetapi lebih didorong oleh kepentingan politik pemerintah Indonesia. Sebagaimana kita ketahui pasca jajak pendapat Timor Timur dan menjelang jatuhnya rezim Orde Baru, militer banyak melakukan pelanggaran HAM yang berat terhadap warga Timor Timur maupun Warga Negara Indonesia keturunan (Cina). Berdasarkan peristiwa ini beberapa kalangan LSM yang didukung oleh pemerintah Amerika Serikat menuntut beberapa petinggi militer untuk diajukan ke Mahkamah Internasional.

Atas dasar tekanan dan desakan masyarakat internasional dan kalangan LSM dalam negeri tersebut, maka dibentuklah peradilan HAM yang berat di Indonesia. Dengan adanya badan peradilan ini, maka pemerintah Indonesia menganggap pemerintah Indonesia mampu (*able*) dan mau (*willing*) untuk mengadili sendiri pelanggaran HAM yang berat secara *impartian* (tidak

memihak) dan independen atas dasar prinsip "due process" yang diakui oleh hukum internasional.²⁵

E. Penutup

Pengaturan HAM di Indonesia diwarnai oleh tarik menarik kepentingan antara rakyat dengan pemerintah di satu sisi, dan tekanan-tekanan politik luar negeri di sisi yang lain. Bentuk tekanan, maupun tarik menarik untuk mewujudkan nilai HAM ke dalam produk hukum mempunyai dinamika tersendiri. Dalam proses itu masing-masing pihak mempunyai strategi dan aksi yang dikembangkan. Sinergi yang terbangun antara kekuatan-kekuatan *pressure group* di dalam negeri telah melahirkan kekuatan yang besar dalam memberikan perlindungan HAM kepada rakyat.

Sikap pemerintah terhadap pihak asing yang semula dilawan dengan dalih telah melakukan campur tangan politik pemerintahan dalam negeri akhirnya mencair ketika tekanan itu muncul juga dari kekuatan dalam negeri. Disinilah kemudian nampak bahwa pengaturan HAM menunjukkan adanya proses multifacet dan tidak uniform. Kehadiran perangkat perundang-undangan dalam perlindungan HAM baru merupakan proses awal penegakan HAM. Tekanan-tekanan kepada pemerintah masih tetap harus dilakukan agar pemerintah bersungguh-sungguh dalam memberikan perlindungan HAM kepada rakyat.

²⁴ Baca Konsideran dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

²⁵ Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 11. Perfekanan komitmen Indonesia dalam pelanggaran HAM yang berat terkait dengan "primacy" dalam Pengadilan HAM *Ad Hoc* (ICTY dan ICTR) dan istilah "complementary" dalam ICC serta apabila dilihat dari penjelasan Pasal 7 yang menyatakan bahwa "kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Undang Undang ini sesuai dengan Rome Statute of the International Crime Court.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisyahbana, S. Takdir, 1998, *Kebudayaan sebagai Perjuangan*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Korten, C. David C., *When Corpora-tion Rule The World* (Bila Korporasi Menguasai Dunia, Alih bahasa Agus Maulana, Professional Books, Jakarta.
- Huntington, P. Samuel, 1996, *The Clash of Civilization and the Remarking of World Order*, Simon & Schuster, New York.
- Muladi, 2002, *Berbagai Dimensi Peradilan Hak Asasi Manusia*, Makalah pada pe-nataran Nasional Hukum dan Krimi-nologi Kerjasama ASPEHUPIKI dan FH UBAYA.
- Ohmae, Kenichi, *The Boderless World*, diterjemahkan oleh Budiyanto, *Dunia Tanpa Batas*, Binarupa Aksara.
- Pratikno dan Cornelis Lay, 2002, *Komnas HAM 1993-1997, Pergulatan Dalam Otoritarianisme*, Fisipol UGM, Yogya-karta.
- Pollis and Schwab, 1979, *Human Right, A Western Construct with limited Appli-cability*, dalam Human Right: Cultural and Ideological Perspective, Praeger, New York.
- Santos, Boaventura De Saossa, 1995, *To-ward a New Common Sense, Law Sci-ence And Politics in the Paradigmatic Transition*, Roudledge, New York.
- Tanter, Richard, 1990, *The Totalitarian Am-bition: Intelligence Organisation in The Indonesian State*, in Budiman. A (1990, ed), State and Civil Society in Indone-sia, Monash Paper on Southeast Asia No. 22, Monash University, Melbourne.